

**PERSISTENSI INFLASI DI PROVINSI JAWA BARAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**Azzahra Zenithya Bestari**

**2017110051**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1538/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022**

**BANDUNG**

**2023**

***INFLATION PERSISTENCE IN WEST JAVA***



***UNDERGRADUATE THESIS***

***Submitted to complete part of the requirements for Bachelor  
Degree in Economics***

**By**

**Azzahra Zenithya Bestari**

**2017110051**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**

**FACULTY OF ECONOMICS**

**PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS**

**Accredited by National Accreditation Agency No. 1538/SK/BAN-PT/AK-**

**ISK/S/III/2022**

**BANDUNG**

**2023**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PERSISTENSI INFLASI DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

**Azzahra Zenithya Bestari**

**2017110051**

**Bandung, Februari 2023**

**Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,**

**Ivantia S. Mokoginta, Ph.D**

**Pembimbing,**

**Dr. Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Azzahra Zenithya Bestari  
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 10 Februari 1999  
NPM : 2017110051  
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Jenis naskah : Skripsi

## JUDUL

### PERSISTENSI INFLASI DI PROVINSI JAWA BARAT

Pembimbing : Dr. Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc.

## MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hal cipta dan yang disebut plagiat (p/agiator/sm) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang berkarya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, projesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,  
Dinyatakan tanggal: 17 Februari 2023  
Pembuat pernyataan:



Azzahra Zenithya Bestari

## ABSTRAK

Inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di antara para pelaku ekonomi dan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Persistensi inflasi menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi pengambil kebijakan mengontrol perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisa derajat persistensi inflasi di Jawa Barat pada 7 Kota yaitu Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya. Dengan Teknik analisis *Autoregressive (AR)*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat persistensi inflasi di Jawa Barat relatif tinggi pada periode *year-on-year*. (2) Bahwa penyebab dari hasil penelitian inflasi antara *month-to-month* dan *year-on-year* ada pada perbedaan atas harga barang yang berubah-ubah dan musim. (3) Dalam implikasinya terkait dengan perlunya kebijakan yang lebih intensif dan diseminasi informasi untuk meningkatkan sosialisasi dan pedoman serta mengoptimalkan koordinasi melalui forum koordinasi yang telah ada, rapat koordinasi Dewan Gubernur BI dengan pemerintah, forum penargetan inflasi dan tim pengendalian Inflasi.

**Kata Kunci:** Persistensi Inflasi, Ekspektasi, Inflasi.

## ABSTRACT

*High inflation creates uncertainty in decision-making among economic actors and affects people's purchasing power, especially those with fixed incomes. The persistence of inflation causes increasing difficulties for policy makers to control the economy. The purpose of this study is to (1) analyze the degree of inflation persistence in West Java in 7 cities, namely Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, and Tasikmalaya. With Autoregressive analysis technique (AR). The results of the study show that the level of inflation persistence in West Java is relatively high in the year-on-year period. (2) that the cause of the results of inflation research between month-to-month and year-on-year is in the difference in prices of goods that fluctuate and season. (3) in terms of implications related to the need for more intensive policies and information dissemination to improve socialization and guidelines as well as optimize coordination through existing coordination forums, BI Board of Governors coordination meetings with the government, inflation targeting forums and Inflation control teams.*

**Keywords:** *Inflation Persistence, Expectation, Inflation.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persistensi Inflasi Di Provinsi Jawa Barat”. Karya ini dirancang sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk penelitian ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua penulis, Usep Sugeng dan Dwi Aryanti yang selalu memberikan doa terbaik, kasih sayang, nasihat, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Saudara penulis, Puja Bestara, Naufal Oktazain dan Novran Jazmi Thariq dan seluruh keluarga penulis yang tidak dapat diucapkan satu-persatu, atas segala doa dan motivasinya.

Terima Kasih Bapak Dr. Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dan telah memberikan ilmu, menyediakan waktu, tenaga, pikiran guna menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih kepada Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Ibu Dr. Miryam L. Wijaya, serta Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan Bandung atas ilmu, waktu dan motivasi selama penulisan skripsi serta pengalamannya selama masa perkuliahan.

Penulis tidak luput berterima kasih kepada teman seperjuangan skripsi Syahla, Kathya, Syifa, Faruq, Putri, Hasna, Afsha dan Nico atas kebersamaan, diskusi, masukan, kritik, dan motivasi selama mengerjakan skripsi. Dan juga Terima kasih kepada sahabat penulis Fauziah Sadjala dan Pebri Widiyanto yang selalu membantu dan berbagi keluh kesah bersama, dan juga teman-teman Ekonomi Pembangunan 2017 atas kekeluargaan, kebahagiaan dan kebersamaan selama kuliah di UNPAR. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Bandung, 17 Februari 2023

Azzahra Zenithya Bestari

# DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Persistensi Inflasi.....	7
2.2 Pengukuran Persistensi Inflasi.....	8
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....	12
3.1 Metode Penelitian.....	12
3.2 Objek Penelitian .....	13
3.2.1 Indeks Harga Konsumen.....	13
3.2.2 Inflasi.....	14
3.3 Data Penelitian .....	15
3.4 Teknik Analisis Data.....	16
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	18
4.1 Uji Stasioneritas .....	18
4.2 Pengukuran Derajat Persistensi Inflasi Jawa Barat .....	21
BAB 5 PENUTUP .....	25
5.1 Kesimpulan.....	25
5.2 Rekomendasi.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28
Lampiran 1: <i>Unit Root Test</i> .....	A-1
Lampiran 2: <i>Unit Root Test</i> terhadap residual.....	A-21
Lampiran 3: Hasil Olah Data OLS .....	A-29
Lampiran 4: <i>Wald-test</i> .....	A-34
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	A-39



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data penelitian .....	16
Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas .....	18
Tabel 3. Hasil Uji Stasioneritas terhadap Residual .....	21
Tabel 4. Derajat Persistensi inflasi di Provinsi Jawa Barat .....	21
Tabel 5. Uji Wald Persistensi inflasi di Provinsi Jawa Barat .....	23

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Indeks Harga Konsumen Indonesia 2016-2021 .....	13
Grafik 2. Inflasi Indonesia 2016-2021 .....	14
Grafik 3. Waktu Yang Dibutuhkan Inflasi Kembali ke Nilai Rata-rata menggunakan data <i>month-to-month</i> .....	23
Grafik 4. Waktu Yang Dibutuhkan Inflasi Kembali ke Nilai Rata-rata menggunakan data <i>year-on-year</i> .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka kebijakan ITF .....	3
--	---

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah yang dituangkan dalam UU No. 13 Tahun 1968, yang kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2003. Bank Indonesia diberi tugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap barang, jasa dan terhadap nilai uang luar negeri. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan mempertahankan inflasi pada nilai rendah atau stabil dan menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri. Lingkup ruang dan waktu respons kebijakan moneter yang harus ditetapkan sebagai tujuan inflasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat inflasi yang dicapai tetapi juga oleh pergerakan inflasi. Sasaran inflasi akan diturunkan secara bertahap hingga mencapai tingkat yang mendorong ekspansi ekonomi jangka panjang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setelah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter, pemerintah akan mengadopsi tujuan inflasi. Dengan kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) Bank Indonesia berusaha menggiring ekspektasi inflasi di perekonomian sehingga inflasi yang terjadi mendekati inflasi yang ditargetkan. Persistensi inflasi, atau tingkat di mana inflasi cenderung sulit berubah menyebabkan kerangka kerja ITF sulit dilakukan karena inflasi yang terjadi saat ini cenderung lebih ditentukan oleh pengalaman inflasi masa lalu dan bukan ekspektasi inflasi yang coba BI pengaruhi melalui ITF.

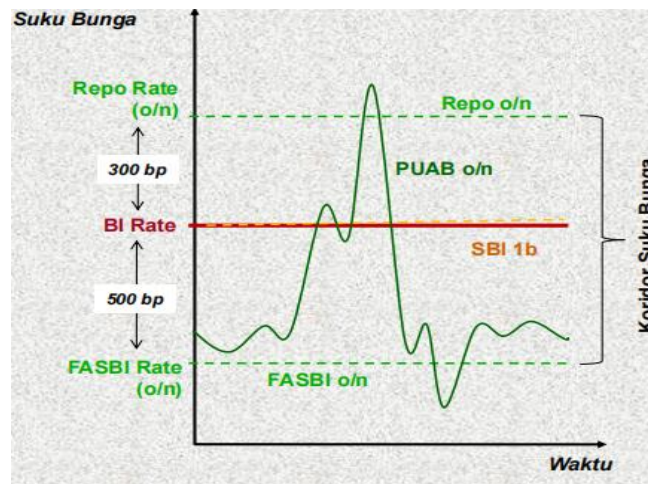
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997 - 1998 telah melumpuhkan perekonomian Indonesia. Banyak industri yang mengalami kebangkrutan termasuk industri keuangan seperti bank, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan *Monetary Targeting Framework/base money*. Fokus dari penerapan kebijakan ini yaitu menciptakan serta menjaga kestabilan moneter di Indonesia. *Monetary Targeting Framework* pada

dasarnya bertujuan untuk mengendalikan peredaran uang sebagai intermediate target dan uang primer sebagai operational target untuk mencapai kestabilan ekonomi moneter. Dalam rangka menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia memiliki tiga kebijakan moneter, yaitu penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan sistem perbankan (Warjiyo & Solikin, 2003).

*Inflation Targeting Framework* (ITF) telah menjadi kerangka kebijakan moneter Indonesia sejak 1 Juli 2005. Hal ini menandai titik balik evolusi kerangka kebijakan moneter setelah krisis keuangan Indonesia. Kerangka moneter pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas kerangka kebijakan seputar penggunaan suku bunga sebagai tujuan operasional dan tindakan proaktif. ITF diantisipasi untuk mengubah *backward looking expectation* yang menyebabkan inflasi tinggi menjadi *forward looking expectation*. Hal tersebut pertama kali diterapkan di Selandia Baru pada tahun 1990, kemudian kerangka kebijakan ini juga diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Finlandia, Spanyol, Australia, Brazil, Thailand, Filipina serta beberapa negara lainnya. Menurut Freedman & Laxton (2009) terdapat enam pilar utama dalam penerapan *Inflation Targeting* (IT). Peran utama kebijakan moneter adalah untuk memberikan arahan (*nominal anchor*) bagi perekonomian dan memberikan bobot pada tujuan lain tidak boleh bertentangan dengan memberikan arahan bagi ekspektasi inflasi dan inflasi. Kedua, penargetan inflasi yang efektif akan memiliki dampak positif yang menguntungkan pada kesejahteraan dengan mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian, mengarahkan pada ekspektasi inflasi dan mengurangi insiden dan keparahan siklus *boom-bust*. Ketiga, keberhasilan penargetan inflasi tergantung pada kebijakan lain yang membuat tugas kebijakan moneter lebih mudah dan lebih kredibel. Keempat, karena ada *delay* dalam mekanisme transmisi moneter, dan karena kekhawatiran akan penyimpangan inflasi dari targetnya dan penyimpangan output dari potensinya, adalah tidak mungkin atau tidak diinginkan untuk menjaga inflasi tepat sasaran sehingga dalam praktiknya *inflation targeting* menjadi *inflation-forecast targeting*. Kelima, mengingat kemungkinan konflik antara target inflasi dan tujuan lainnya. Keenam, harus ada mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa bank sentral berperilaku dengan cara yang konsisten dengan tujuan

dasar yang diumumkan dan kebijakan moneter didasarkan pada praktik yang sehat. Dalam penerapannya di Indonesia, kebijakan ITF ini difokuskan pada kestabilan perekonomian domestik dengan cara yaitu Bank Indonesia menetapkan target inflasi jangka menengah serta mencapai suatu stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang.

**Gambar 1. Kerangka kebijakan ITF**



Sumber: (Bank Indonesia, 2020)

Namun setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008/2009, kerangka kebijakan ITF ini berubah menjadi kerangka kebijakan *Flexible* ITF. Menurut Bank Indonesia Kebijakan ITF yang berlaku pada tahun 2005 memerlukan beberapa penyempurnaan. Dari gambar diatas, dapat terlihat koridor suku bunga yang berlaku ialah 800 basis point dengan rincian yaitu fasbi rate sebesar 500 basis poin dan repo rate sebesar 300 basis poin, namun setelah terjadi krisis ekonomi 2008 Bank Indonesia menilai bahwa *spread* suku bunga ini terlalu besar sehingga akan menyebabkan distorsi pada kebijakan moneter dimana suku bunga jangka pendek pergerakannya terlalu fluktuatif dan tidak sejalan dengan sinyal BI *rate*. Sehingga koridor suku bunga ini disempurnakan menjadi 100 basis poin dengan rincian yaitu fasbi rate sebesar 50 basis poin dan repo rate sebesar 50 poin. Dengan koridor suku bunga yang lebih sempit, ketika bank kekurangan dana, Bank Indonesia akan melakukan *Fine Tune Expansion* (FTE) dengan suku bunga yang lebih murah dan saat bank kelebihan dana, Bank Indonesia akan melakukan *Fine Tune Kontraksi* (FTK). Dalam *Flexible* ITF sertifikat Bank Indonesia yang sebelumnya mengacu pada

BI rate sudah tidak mengacu pada BI rate. Selain itu dalam kerangka kebijakan ITF Bank Indonesia yang fleksibel membantu meningkatkan infrastruktur pasar dan perbankan, selain itu membantu menciptakan ekonomi yang stabil, kuat dan efisien. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan, Bank Indonesia telah mengembangkan kerangka ITF yang fleksibel berdasarkan 5 (lima) elemen utama. Pertama, inflasi selalu menjadi target utama kebijakan moneter. Kedua, mengintegrasikan kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas ekonomi. Ketiga, penguatan kebijakan penguatan nilai tukar dan aliran keuangan untuk mendukung stabilitas ekonomi. Keempat, memperkuat koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas keuangan. Kelima, meningkatkan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Mengenai inflasi yang sedang berlangsung di Indonesia, beberapa penelitian telah dilakukan. Di Indonesia, tingkat persistensi inflasi biasanya relatif tinggi, namun cenderung menurun pada periode pascakrisis, menurut penelitian Yanuarti (2007) dan Alamsyah (2008). Harmanta (2009) menambahkan bahwa sementara inflasi ke depan telah tumbuh selama periode ITF, persistensi inflasi ke belakang telah berkurang. Agar kesinambungan inflasi ditelaah lebih mendalam di tingkat daerah, maka kajian ini perlu dilengkapi dengan penelitian daerah. Pengetahuan bahwa inflasi regional mengarah pada inflasi nasional menjadi pembenaran yang lebih untuk hal ini. Meskipun secara umum tekanan inflasi di daerah lebih banyak terkait dengan guncangan di sisi supply, kajian persistensi inflasi di daerah secara khusus memperhatikan karakteristik inflasi masing-masing daerah yang berimplikasi pada kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Trisanto (2011), untuk mengukur persistensi inflasi di Jakarta, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui sumber dari persistensi inflasi dan pengaruhnya terhadap pengendalian inflasi daerah. Dengan menggunakan model estimasi NKPC, ditemukan bahwa tingginya persistensi inflasi di Jakarta disebabkan oleh ekspektasi terhadap inflasi (*backward looking* atau *forward looking*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khusaini et al (2021) yang mengukur persistensi inflasi di

delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan menggunakan model AR. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa inflasi di delapan kabupaten/kota cenderung berfluktuatif sepanjang periode penelitian, dan derajat persistensi inflasi di delapan kabupaten atau kota masih tinggi sehingga memerlukan perhatian dari regulator atau pemerintah. Persistensi inflasi ini disebabkan oleh tingginya ekspektasi inflasi (*forward looking*).

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Kajian atas persistensi ini sangatlah penting dilakukan agar dapat membantu merumuskan kebijakan moneter yang lebih efektif. Hal ini disebabkan tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap kegiatan ekonomi dan juga dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang diperlukan agar kebijakan moneter ini dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umum. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah, maka pemerintah daerah perlu mendapat perhatian agar dapat berperan aktif dalam menurunkan inflasi.

Tingkat perubahan harga yang dicerminkan oleh inflasi masih merupakan salah satu variabel makroekonomi yang tidak jauh dari kisaran target yang dicapai, karena inflasi secara ringkas menggambarkan perkembangan pasar keuangan dan sektor riil secara langsung. Dalam tautan lainnya, inflasi menunjukkan kapasitas produksi, efisiensi sistem distribusi/logistik, dan tingkat daya beli masyarakat.

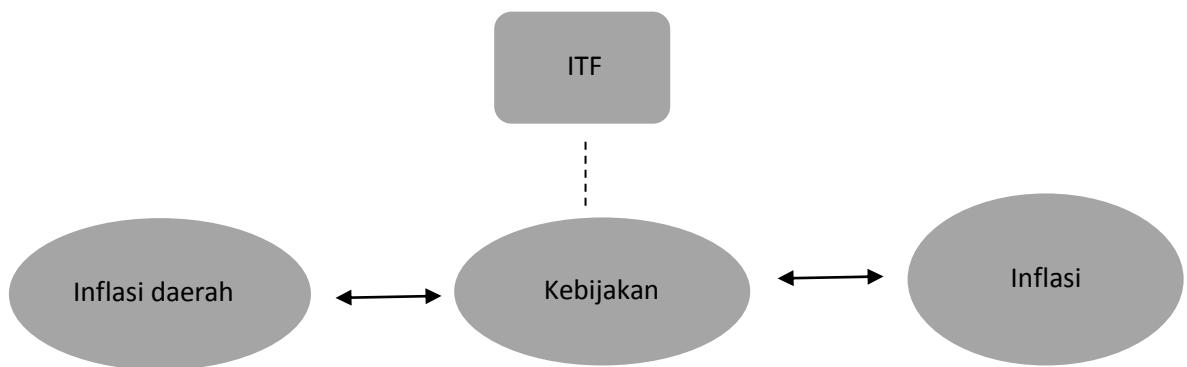
Tingkat inflasi pada Januari sebagai awalan kinerja pada 2019 telah diumumkan dan kinerja inflasi pada periode ini sangat baik dengan kinerja sebesar 0,32% (mtm) atau 2,82% (yoy) bila dibandingkan periode Januari 2018. Inflasi Januari juga membaik dibandingkan dalam 3 tahun terakhir karena inflasi telah mengalami penurunan. Pada Januari 2017 inflasi sebesar 0,97% (mtm). Pada periode Januari 2018 angka inflasi sebesar 0,62% (mtm).

## **1.3 Tujuan Penelitian**



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa derajat persistensi inflasi di Jawa Barat pada 7 Kota yaitu Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya.

#### 1.4 Kerangka Pemikiran



Kebijakan moneter merupakan salah satu cara untuk mengatasi inflasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negara tersebut. Kebijakan moneter lainnya adalah kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah uang beredar. Sesuai dengan kerangka di atas yang menggambarkan bahwa suatu inflasi ini dapat dikendalikan oleh kebijakan yang diatur oleh pemerintah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF).